

Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

14 Maret 2022

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Visi, Tujuan, dan Prinsip Dasar IKN

BAB III

Prinsip Dasar Pembangunan IKN

BAB IV

Rencana Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan – A. Latar Belakang dan B. Tujuan dan Sasaran



Latar Belakang

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan sebagai **salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045** yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu **upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan** antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa.

Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu:

1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap;
3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN;
5. Minim risiko bencana alam.

Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *Rapid Assessment* (KLHK, 2019) dan KLHS Masterplan IKN (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).



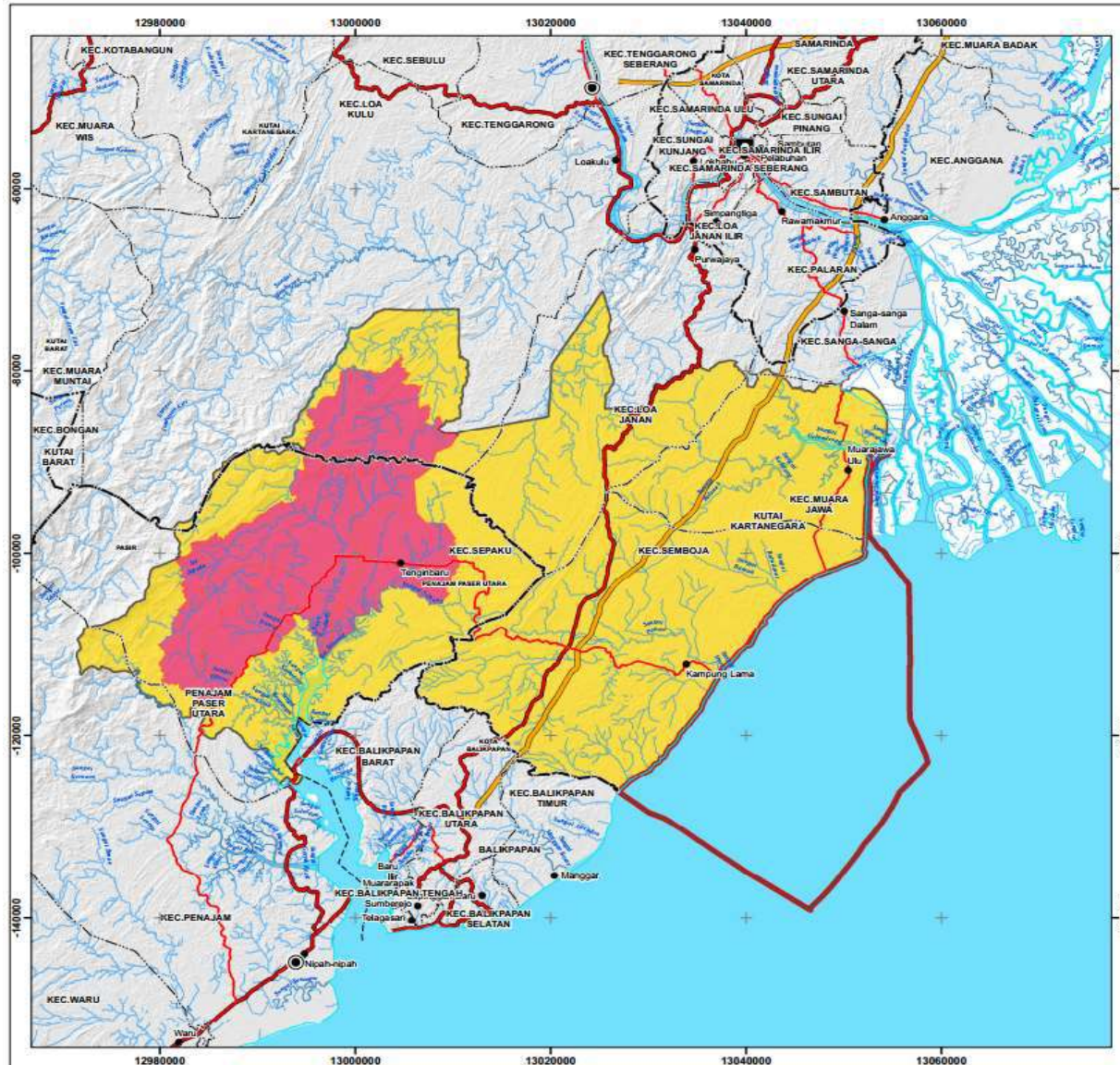
Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara adalah sebagai **“pedoman dalam persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan IKN”**

Adapun sasaran penyusunan RI IKN adalah sebagai acuan untuk:

1. Batasan penataan serta penggunaan ruang dan kawasan dalam IKN
2. Pembangunan kawasan dan ekonomi
3. Pengembangan sosial
4. Pengelolaan pertanahan
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kebencanaan
6. Pembangunan sistem keamanan dan pertahanan
7. Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung
8. Peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pusat pemerintahan
9. Proses, tahapan pembangunan dan pemindahan, serta skema pendanaan yang akan digunakan.

Bab I Pendahuluan – C. Ruang Lingkup (C1. Ruang Lingkup Wilayah)



Ruang Lingkup Wilayah

- ✓ Secara administratif, wilayah IKN terletak di **dua Kabupaten eksisting yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara**
 - ✓ **Wilayah IKN** berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda dengan luasan **wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare** dan luas **wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare**.
- Pengembangan wilayah **IKN** terbagi atas **tiga wilayah perencanaan**, yakni:
- 1 **Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN)**, dengan luas wilayah kurang lebih **199.962 hektare**.
 - 2 **Kawasan IKN (KIKN)**, dengan luas wilayah kurang lebih **56.180 hektare**.
 - 3 **Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)**, yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah kurang lebih **6.671 hektare**.



BAB II

Visi, Tujuan, dan Prinsip Dasar Ibu Kota Negara

- Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah;
- Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris;
- Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan
- Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Visi IKN: 'Kota Dunia untuk Semua', dengan tujuan untuk membangun:

- ✔ Simbol Identitas Nasional
- ✔ Kota Berkelanjutan di Dunia
- ✔ Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan



Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Dasar Ibu Kota Negara – B. Prinsip dan Indikator Kerja Utama IKN

| 1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam | 2. Bhinneka Tunggal Ika | 3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses | 4. Rendah Emisi Karbon | 5. Sirkuler & Tangguh | 6. Aman & Terjangkau | 7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi | 8. Peluang Ekonomi untuk Semua |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| <p>1.1 >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)</p> <p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)</p> | <p>2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru</p> <p>2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p>2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif</p> | <p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030</p> | <p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN</p> <p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p>4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha</p> | <p>5.1 >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p>5.2 60% daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045</p> <p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p> | <p>6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045</p> <p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p> <p>6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah dan sederhana</p> | <p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index (EGDI)</i> oleh UN</p> <p>7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p>7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat <i>Digital Services</i></p> | <p>8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035</p> <p>8.2 PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi</p> <p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p> |



BAB III

Prinsip Dasar Pembangunan IKN

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – A. Pengembangan Kawasan (1/2)

Kota Hutan (*Forest City*)

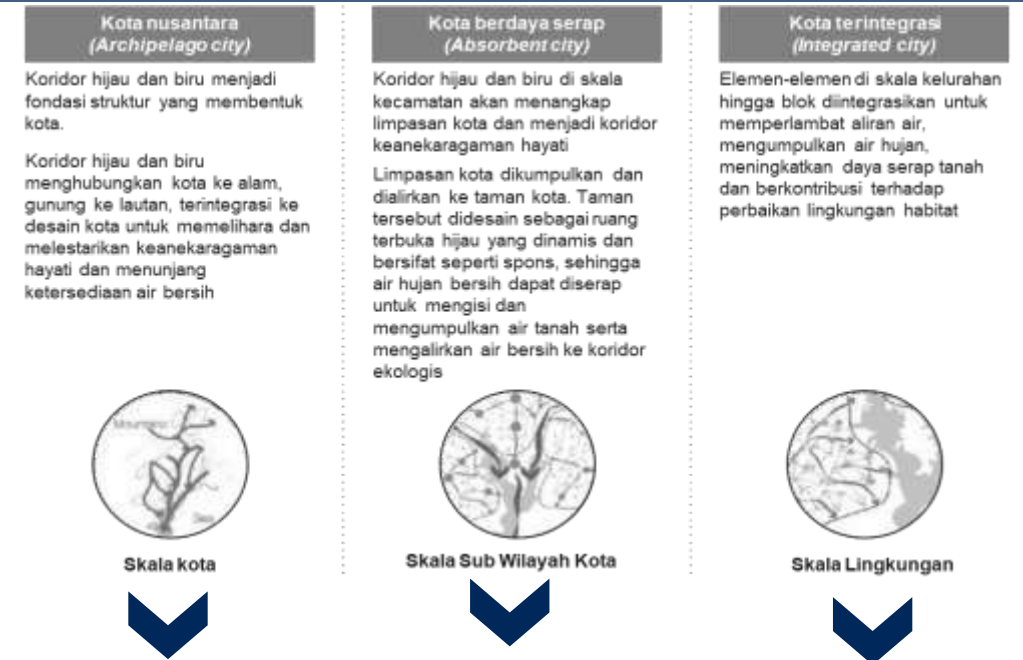
- IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnya di kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN.
- Kota hutan adalah kota yang menerapkan pendekatan lanskap yang terintegrasi dan didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan dan RTH yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Prinsip Kota Hutan



Kota Spons (*Sponge City*)

- Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer



Tujuan Kota Spons

- Efisiensi sistem sumber daya
- Memberikan manfaat rekreasi bagi masyarakat

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – A. Pengembangan Kawasan (2/2)



A.3 Kota Cerdas (*Smart City*)

- *Smart City* (Kota Cerdas) telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan dan terhubung.
- Komponen *Smart City* mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan.

1 *Smart City* IKN

***Smart City IKN* terdiri atas 3 unsur utama:**

- a. Visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN
- b. Wilayah dan strategi cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN
- c. Inisiatif cerdas untuk pengembangan kota

2 Inisiatif Cerdas yang harus diprioritaskan IKN

- a. Akses dan Mobilitas;
- b. Lingkungan Hidup dan Iklim;
- c. Keamanan dan Keselamatan;
- d. Sektor Publik;
- e. Sistem Perkotaan; dan
- f. Kelayakan Huni dan Kedinamisan.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – B. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi (1/2)

Ekosistem Superhub



Superhub Ekonomi IKN dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia melalui strategi ekonomi dan ekosistem relevan.

IKN Economic Superhub juga dirancang untuk beroperasi pada tiga tingkatan, yaitu secara domestik, *global*, dan *universal*, yang dirangkum dalam visi ***Reimagined Indonesia: Locally Integrated, Globally Connected, Universally Inspired.***

- Mewujudkan Tujuan Terintegrasi dalam **skala lokal** melalui:
 1. Strategi **3 Kota** (IKN-Balikpapan-Samarinda)
 2. Sektor Ekonomi ***Prime-mover***
 3. Memperkuat **Rantai Nilai Domestik** untuk wilayah KTI dan Indonesia
- Mewujudkan Tujuan Terhubung dalam **skala Global**
 - Di tingkat Asia, Ekosistem *Superhub* akan memperkuat klaster farmasi, petrokimia, serta pertanian dan inovasi pangan.
 - Di tingkat global, Ekosistem *Superhub* akan memperkuat klaster kota pintar dan pusat teknologi digital, kendaraan listrik, serta ekowisata dan kesehatan
- Mewujudkan Tujuan memberikan **Inspirasi secara Universal**
 - Superhub Ekonomi IKN juga akan menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi

Kerja Sama 3 Kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda): Mesin Penggerak Ekonomi untuk Indonesia Masa Depan



SAMARINDA sebagai Jantung: Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan

- Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur
- Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan
- Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan

IKN sebagai Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini

- Pusat layanan pemerintah dan masyarakat
- Pusat inovasi dan pusat bakat
- Industri bersih dan berteknologi tinggi
- Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut



BALIKPAPAN sebagai Otot: simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

- Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia
- Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

KALIMANTAN TIMUR sebagai Paru-paru: Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam

- Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
- Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agriindustri

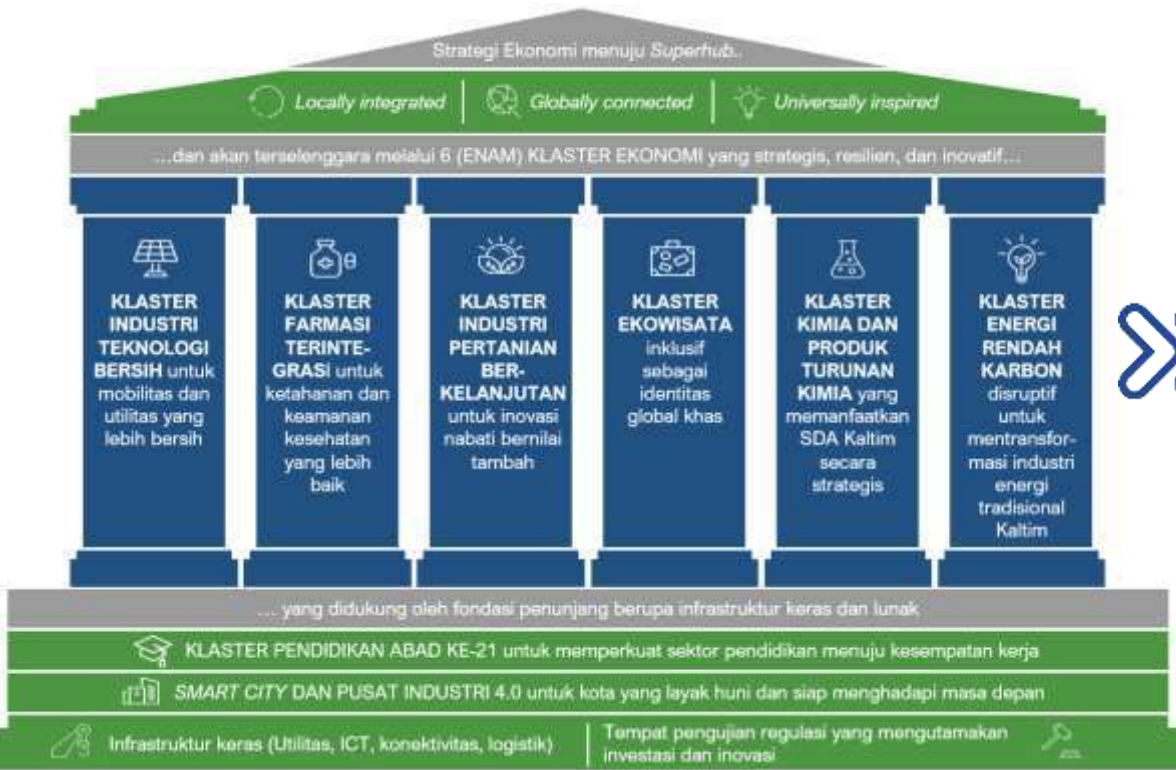


Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – B. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi (2/2)



Prioritas Klaster Ekonomi dan Strategi Klaster

Visi IKN *Economic Superhub* akan diwujudkan melalui 6 klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif, dengan dukungan fondasi yang kokoh dalam bentuk infrastruktur



Proyeksi populasi yang akan tinggal di IKN pada 2045 berkisar dari 1,7 hingga 1,9 juta jiwa yang dapat memberikan dukungan pada sektor ekonomi

| | | Membangun sektor masa depan | Meningkatkan sektor eksisting | Membuka jalan untuk sektor masa depan |
|-----------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Inovatif | Industri teknologi bersih | Electric-2-Wheelers | | Smart City dan Pusat I4.0 |
| | | Manufaktur solar PV | | |
| Resilien | Farmasi terintegrasi | Bahan aktif obat-obatan generik | | Pendidikan abad ke-21 |
| | | Biosimilar | | |
| Strategis | Industri pertanian berkelanjutan | Vaksin | | Memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja |
| | | Protein nabati | | |
| | Ekowisata dan pariwisata kebugaran yang inklusif | Produk herbal dan bernutrisi | Pertanian | Ekowisata |
| | | Produk ekstrak tumbuhan | | |
| | Kimia dan produk turunan kimia | MICE | | Pertambangan migas |
| | | Pariwisata kota | | |
| | Sektor energi rendah karbon | Pariwisata kesehatan dan kebugaran | | Pertambangan batu bara |
| | | Petrokimia | | |
| | | Oleokimia | | Kelapa sawit |
| | | Biofuel | | |
| | | Bahan bakar sintetis | | |
| | | Gasifikasi batu bara | | |

Enam klaster inovatif, resilien dan strategis dengan masing-masing perannya

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – C. Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia (1/2)

C.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial



- Mengakui keragaman komunitas, baik penduduk lokal maupun pendatang baru. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN tidak dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota serta akan mendapatkan manfaat dari pengembangan IKN dan akan memberikan kontribusi bagi IKN
- Mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada sekarang maupun yang akan ada setelah IKN dibangun



1. Pengembangan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan yang difokuskan dengan pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berkesinambungan



2. Pembangunan kompetensi untuk memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata



3. Pemerataan akses ke fasilitas dan ruang publik untuk menghubungkan seluruh komunitas yang ada untuk membentuk identitas IKN



4. Pengadaan lahan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan sosial



5. Revitalisasi dan penataan kawasan permukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata pencaharian dan keterikatan warisan sejarah dan budaya

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – C. Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia (2/2)

C.2 Prinsip Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia



Kesehatan

Definisi Sehat Menurut WHO

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap/utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan".

Definisi Sehat Menurut UU No.36/2009 (Pasal 1 Ayat 1)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis



Pendidikan

Prinsip dasar pendidikan di K-IKN secara keseluruhan akan diarahkan kepada konsep pendidikan Abad 21

yang selaras dengan visi pendidikan di K-IKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup.



Ketenagakerjaan

Penciptaan Lapangan Kerja

- Pada tahap awal pembangunan IKN, penciptaan lapangan kerja akan bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi.
- Dalam jangka menengah dan panjang, pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan kawasan lainnya di seluruh penjuru pulau Kalimantan dan sekitarnya

Framework Kota Sehat (*Healthy City*) di IKN



Pengembangan *framework* kota sehat perlu mempertimbangkan 3 aspek, mencakup:

- 1) Individu
- 2) Masyarakat
- 3) Lingkungan

Dasar pertimbangan:

- i. Intervensi di tingkat kejuruan
- ii. Penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan tersier lanjutan di bidang STEM dan manajemen
- iii. Pendidikan K12 berkualitas tinggi menjadi kriteria utama untuk menarik minat pendatang.

Pelibatan Tenaga Kerja Lokal

- Kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk pembekalan keterampilan/*skilling* dan alih kompetensi/*reskilling*).
- Untuk meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat di IKN dan wilayah mitra memperoleh keahlian baru, maka Transformasi BLK di sekitar wilayah IKN menjadi salah satu strategi di dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – D. Prinsip Dasar Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan

Proses Penyediaan Tanah



Tahap Pengadaan Tanah*)



Pengelolaan Pertanahan

- Otorita IKN diberikan kewenangan mengelola wilayah IKN dan diberikan hak pengelolaan atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN.
- Pengalihan HAT di IKN wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita IKN.
- Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di IKN.

Subjek Pengadaan Tanah



Objek Pengadaan Tanah



Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – E. Prinsip Dasar Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Prinsip Lingkungan

- Pengembangan lingkungan hidup difokuskan pada pemeliharaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta restorasi jaringan hijau dan biru.
- Lahan-lahan yang sensitif secara ekologi, kawasan jelajah satwa, dan hutan yang penting untuk spesies yang terancam punah, dilindungi sebagai komponen penting struktur kota dan menentukan identitas IKN.
- Lahan-lahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan KPI untuk mendukung konsep *Forest City*

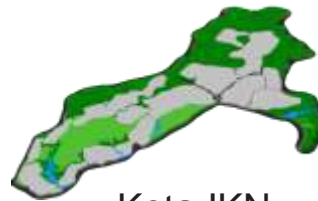
Perkiraan Hirarki Ruang Terbuka Hijau



Wilayah total IKN

75%

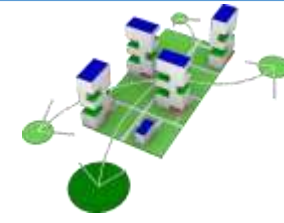
Area hijau di dalam 256 ribu ha yang terdiri dari 65% area yang dilindungi dan 10% area produksi



Kota IKN

50%

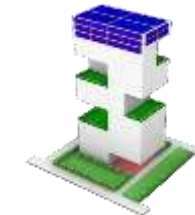
Ruang hijau terbuka di area seluas 56 ribu ha



Bagian kota

60%

Ruang hijau dalam satu blok



Bangunan

100%

Konstruksi ramah lingkungan untuk tiap bangunan dengan 4 lantai atau lebih



Upaya untuk melestarikan alam **memulihkan kawasan bekas tambang, mendukung ketahanan pangan, dan menunjang sistem infrastruktur yang efisien, dirancang untuk memberikan manfaat secara langsung bagi penduduk IKN** sehingga menjamin kelayakan hidup penduduk dan menghormati batas-batas lingkungan alam.



Pemanfaatan produksi pangan lokal yang dipenuhi oleh strategi ketahanan pangan IKN sejalan dengan strategi IKN yang menginginkan parameter perancangan perkotaan terkait produksi pangan berbasis ekonomi sirkular (*circular economy*).



Rancangan kota IKN membangun hubungan baru antara ekologi dan manusia guna mencerminkan prinsip-prinsip yaitu selaras dengan alam; IKN dengan **net zero emission; serta sirkular dan tangguh.**

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.1)



F.1 Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Pembangunan perumahan ASN dan perumahan non-ASN (masyarakat umum).
2. Pembangunan perumahan mengikuti rencana fungsi tata ruang yang merupakan kawasan *mixed-use* dan *mixed* demografi di IKN.
3. Penyediaan hunian memperhatikan kelas jabatan dan *housing career system* yang memperhatikan *family size* dan kemampuan dalam operasi dan pemeliharaan hunian.
4. Pembangunan perumahan menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan cara pandang dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien
5. Penyediaan perumahan dinas ASN/TNI/Polri memperhatikan proses transisi pegawai dan keluarganya, terutama pada 5 tahun pertama.

Spesifikasi rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI dan Polri

| No | Peruntukan Hunian | Tipe Rumah | Luas Unit (m ²) |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | Menteri/Pejabat Tinggi Negara | Rumah Tapak | 580 |
| 2. | Pejabat Negara | Rumah Tapak | 490 |
| 3. | JPT Madya/Eselon I | Rumah Tapak | 390 |
| 4. | JPT Pratama/ Eselon 2 | Rumah Susun | 290 |
| 5. | Administrator/ Eselon 3 | Rumah Susun | 190 |
| 6. | Pejabat Fungsional dan Staf Lainnya | Rumah Susun | 98 |



Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.2)

F.2 Infrastruktur Persampahan

Di IKN, 100 persen sampah ditargetkan untuk ditangani dan diolah supaya dapat beralih dari pengelolaan sampah tradisional. Sampah dipisahkan pada sumbernya dan dikumpulkan menggunakan berbagai cara untuk diolah secara terpusat.

KPI yang relevan

5. Sirkuler & Tangguh



5.2 Sekitar **60%** daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045

Pembangunan Fasilitas Persampahan

- Pembangunan fasilitas persampahan di luar Kawasan lingkungan untuk menghindari dampak pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nilai konservasi tinggi.
- Fasilitas pengolahan persampahan industri ditempatkan berdekatan dengan berbagai industri untuk mengolah limbah berbahaya secara langsung di lokasi sebelum dipindahkan ke pusat pengolahan sampah untuk pengolahan lebih lanjut.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelum pembangunan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh pusat pengolahan sampah terhadap lingkungan dan sekitarnya
- Pengolahan limbah difokuskan pada pengurangan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.



- ✓ Di IKN, 100% sampah ditangani dan diolah. Sampah dipisahkan pada sumbernya dan dikumpulkan untuk diolah secara terpusat.
- ✓ Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Rumah Tangga didaur ulang, dijadikan kompos, dan residunya dibawa ke TPA,
- ✓ Barang hasil daur ulang akan digunakan sebagai bahan baku untuk produk baru.



- Pusat pengolahan sampah terpadu untuk mewujudkan sinergi ekonomi, mengurangi biaya transportasi dan operasi, serta untuk memberikan mengendalikan masalah lingkungan

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.3)



F3. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah

KPI yang relevan

-  5. Sirkuler & Tangguh

5.2 Sekitar **60%** daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045

5.3 Sekitar **100%** air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

Air limbah diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah akan membentuk sistem ganda untuk melayani IKN serta akan melayani industri dan permukiman yang ada di luar IKN



- Sistem ganda direkomendasikan untuk melayani IKN, dengan memusatkan sistem pengolah di daerah *nexus*.
- Mengurangi jarak antara sumber air limbah dan lokasi pengolahan sehingga dapat mengurangi panjang pipa.
- Sistem pengelolaan akan menghasilkan jaringan dengan sistem gravitasi.
- Air limbah akan diolah dan didaur ulang ke dalam pengolahan air (bukan untuk konsumsi).
- Timbulan air limbah dihasilkan oleh semua pengguna air dengan sistem sanitasi yang dialirkan melalui jaringan air limbah perkotaan.
- Strategi utama pengolahan air limbah mengacu kepada komponen dari SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.4)

F.4 Infrastruktur Air

Pengelolaan sumber daya air perkotaan bertujuan untuk akses air minum yang aman, sistem sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir.

KPI yang relevan

6. Aman & Terjangkau



6.2

Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan **256k memiliki akses terhadap infrastruktur penting** di 2045

KPI ini menjawab tantangan keterjangkauan yaitu menjamin keamanan seputar kebutuhan hidup yang vital seperti akses terhadap energi, sanitasi, **air minum aman untuk dikonsumsi**, cakupan telekomunikasi, ketersediaan hunian yang memadai, akses terhadap transportasi, peluang ekonomi, dan sarana dasar lain seperti layanan kesehatan primer.

Strategi Pengelolaan Air

Pengelolaan sumber daya air perkotaan bertujuan untuk memberikan keamanan akses air minum yang andal, sistem sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Strategi ini juga akan menerapkan prinsip Kota Spons (*Sponge City*) untuk mengintegrasikan jaringan biru dan hijau agar dapat memberikan manfaat kenyamanan, kelingkungan, dan kesehatan bagi penduduk IKN.



Siklus perputaran air terintegrasi



Sensitif terhadap lingkungan dan ekologi



Efisien dalam penggunaan energi



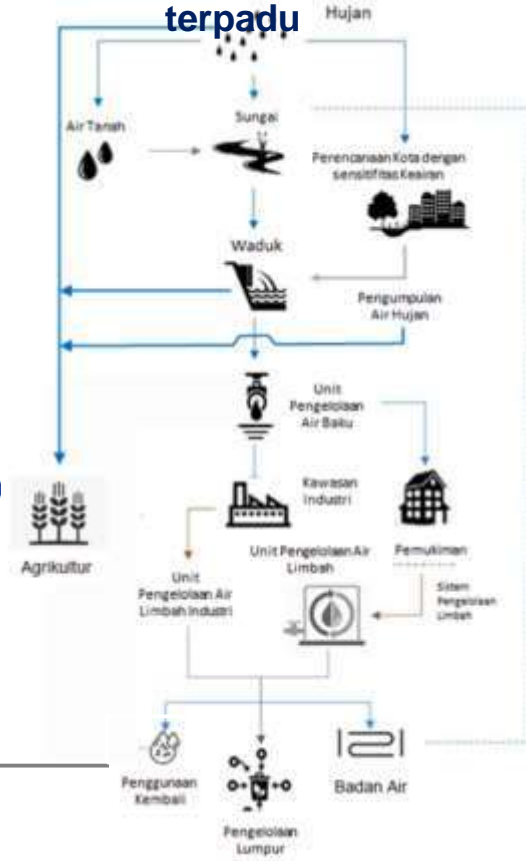
Tangguh terhadap perubahan iklim



Pendekatan Pengelolaan Air Terpadu yang menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan air hujan, dan pengolahan air limbah dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem pengelolaan air secara tradisional, sehingga memungkinkan untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya secara keseluruhan dengan pertimbangan yang cermat pada penggunaannya, dan juga kontribusinya dalam sistem ekologi

Tiga elemen yang perlu digunakan dalam pengembangan pengelolaan air berkelanjutan di kawasan IKN: **(1) ketahanan;** **(2) efisiensi;** dan **(3) kualitas.**

Ilustrasi pendekatan pengelolaan air terpadu



“Penggunaan Kembali” untuk kebutuhan **non-konsumsi skala Kawasan** (taman dan *flushing*) serta kebutuhan industri

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.5)

F.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Secara umum, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki, serta integrasi dengan kawasan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasum fasos bagi penduduk yang dilayaninya, prinsip umum perancangan yang meliputi:

- ✓ Aksesibilitas;
- ✓ Konektivitas;
- ✓ Prinsip Infrastruktur Hijau;
- ✓ Pengelolaan;
- ✓ Keamanan; dan
- ✓ Tanggap bencana.



Pelayanan Publik & Pemerintahan



Pelayanan Kesehatan



Pelayanan Pendidikan



KIPP



[1] Skala Persil dan Distrik

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala persil adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan <15.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 5 menit, serta terintegrasi di bangunan yang terletak di area yang bersifat semipublik.

[2] Skala Sub-sub BWP/Kelurahan

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala sub-sub BWP/kelurahan adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan di antara 15.000 jiwa dan 30.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 10 menit (350 m), serta terletak di pusat distrik yang bersifat publik.

[3] Skala Sub-BWP

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala sub-bwp adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan di antara 30.000 jiwa dan 200.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 20 menit (700 m), serta terletak di pusat kawasan yang bersifat publik.

[4] Skala KIPP

Fasilitas umum dan fasilitas sosial skala KIPP adalah fasilitas umum dan sosial yang memiliki skala pelayanan >200.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki dan terintegrasi dengan transportasi publik. Keberadaannya terletak di area perkotaan dengan pencapaian baik dan dapat menjadi landmark perkotaan.

*Hierarki ruang KIPP berdasarkan dokumen RUTBL Kementerian PUPR (Draft 20 Desember 2021)

Di samping keempat kategori diatas, fasilitas yang didedikasikan khusus sebagai penunjang kinerja IKN dalam KIPP yaitu fasilitas sosial budaya seni, fasilitas keagamaan skala nasional, fasilitas diplomatik, fasilitas pendidikan tinggi dan riset, dan fasilitas penunjang *smart city*.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.6)

F.6 Mobilitas dan Konektivitas

Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, melalui jaringan yang terhubung dengan baik, mudah diakses, tangguh dan berorientasi masa depan. Prinsip dasar penyediaan transportasi dirancang untuk memenuhi semua KPI yang terkait dengan **prinsip yang terhubung, aktif dan mudah diakses**.

KPI yang relevan

3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses



Penerapan KPI dijabarkan ke setiap 6 strategi mobilitas IKN

3.1 Perkiraan **80%** perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif

3.2 Perkiraan **10 menit** ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik

3.3 Perkiraan **<50 menit** Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030

Pendekatan Rumusan Rencana Konsep Mobilitas

Integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan pertimbangan kelayakan dalam pengembangan infrastruktur dapat menghasilkan **rekomendasi konsep, prinsip, dan pedoman transportasi yang holistik, terfokus, dan dapat memberikan hasil yang sepadan dengan investasi yang dikeluarkan (value for money)**, serta dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan Masterplan IKN secara menyeluruh.

Rencana konsep mobilitas didasarkan pada tinjauan dan integrasi **serangkaian peluang dan pertimbangan** yang mendasari rencana tersebut, yaitu:



Kendala lingkungan



Faktor sosial dan penduduk lokal



Kompleksitas medan



Hierarki pusat-pusat kegiatan



Distribusi tata ruang penggunaan lahan



Populasi di masa mendatang



Distribusi lapangan pekerjaan.



1

Kota yang Terhubung

Transportasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Kawasan IKN dan Tiga Kota dengan prinsip utama yang meliputi konektivitas eksternal, internal, dan pintu gerbang IKN

2

Kota yang Kompak & Mudah Dikembangkan

Prinsip utamanya adalah memastikan pengembangan terpadu dan terhubung, memusatkan perhatian pada transportasi terpadu dan tata guna lahan TOD, mempertimbangkan pertumbuhan organik area pengembangan, dan menyediakan layanan I yang mendukung konsep tinggal, kerja, dan bermain

3

Kota Berkelanjutan yang mudah diakses

Memrioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna menciptakan tempat yang berkelanjutan dan menyediakan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat.

4

Kota yang Aktif & Ramah Pejalan Kaki

Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki didesain untuk lebih mengutamakan pejalan kaki daripada kendaraan. Rencana IKN dibangun untuk menyediakan kawasan pejalan kaki sehingga menjadikan ibu kota baru sebagai tempat yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain.

5

Kota yang Efisien, Aman dan Resilien

Meliputi perwujudan hierarki yang mengutamakan manusia, penerapan strategi pengangkutan yang inovatif, prioritas terhadap transportasi umum, adopsi ITS dari solusi teknologi baru, penyediaan kebijakan pendukung, dan keseimbangan dalam pengutamaan moda transportasi.

6

Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Sistem transportasi yang inovatif dan berdampak positif pada masyarakat, lingkungan, ekonomi IKN.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.7)

F.7 Infrastruktur Energi

Target KPI untuk memenuhi 100% kebutuhan listrik dari **energi terbarukan** pada tahun 2045.

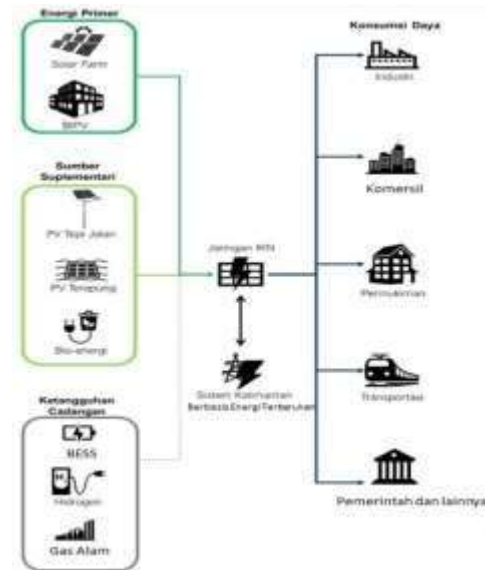
KPI yang relevan

4. Rendah Emisi Karbon

- 4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi **100%** kebutuhan energi IKN
- 4.2 **60%** penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung
- 4.3 **Net zero emission** untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha

Listrik

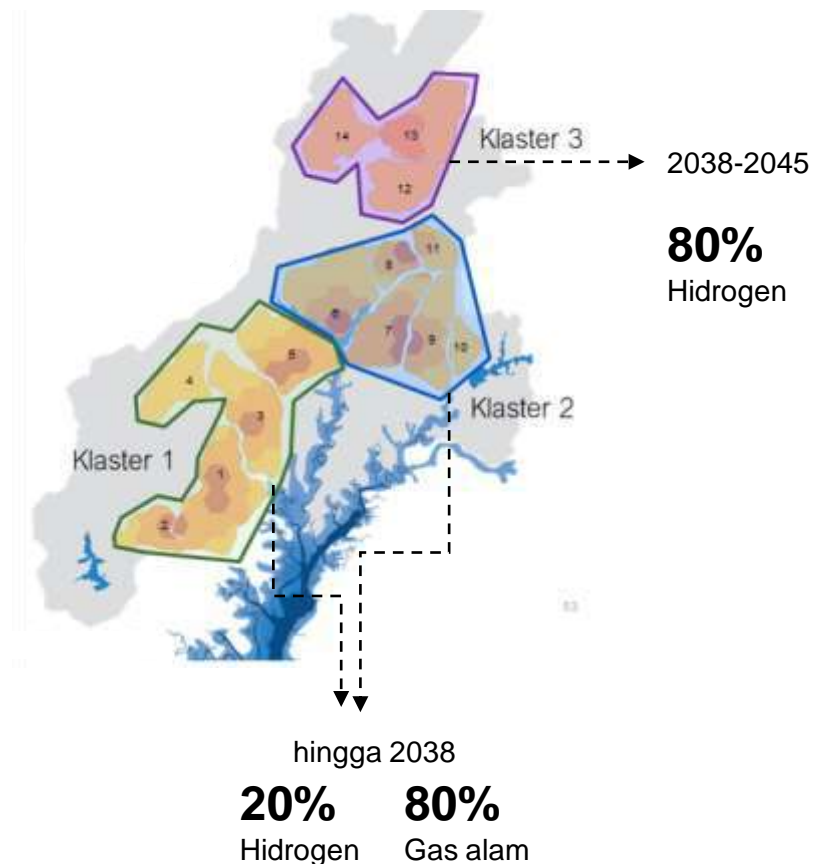
100% dari kebutuhan listrik tahunan IKN dipasok oleh pembangkit listrik terbarukan seperti solar farm dan panel surya atap. IKN akan terhubung dengan Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan berbasis energi terbarukan. IKN akan mengambil pasokan yang dibutuhkan dari Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan.



Energi untuk sistem transportasi IKN



Pasokan energi gas skala kota di K-IKN akan dipasok lewat jaringan gas tiga kota. Gas akan didistribusikan melalui jaringan pipa gas bawah tanah



Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – F. Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur (F.8)

F.8 Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

KPI yang relevan

7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi

7.1 Mewujudkan peringkat **sangat tinggi** dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh UN

7.2 **100%** konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis

7.3 **>75%** Business Satisfaction dengan peringkat *Digital Services*



Konsep

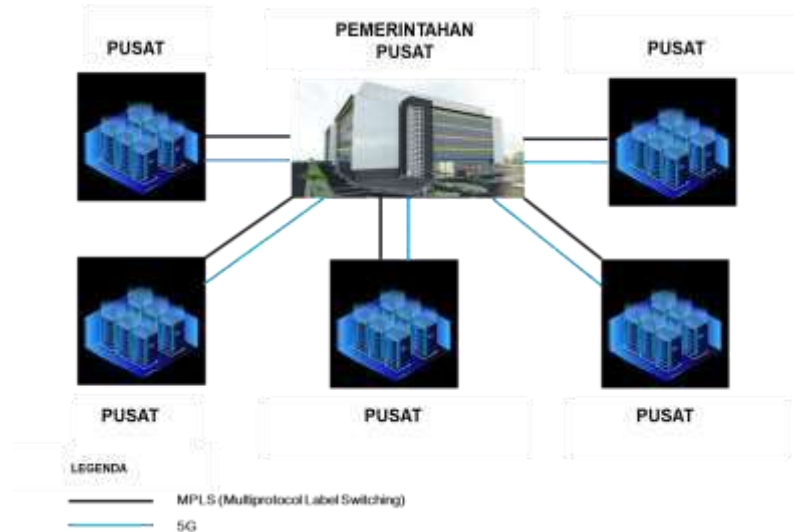
Jaringan Telekomunikasi

- Strategi TIK bertujuan untuk memungkinkan IKN memenuhi prinsip “nyaman dan efisien”. Strategi TIK secara langsung mendukung target KPI untuk ketersediaan **100%** konektivitas digital dan TIK bagi seluruh warga dan bisnis melalui penyediaan infrastruktur konektivitas TIK. Strategi TIK ini juga memungkinkan target KPI yang lain dengan peringkat **Very High** dalam *E-government development index* (EGDI) oleh PBB dan lebih dari **75%** kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi konektivitas TIK guna memungkinkan diterapkannya inisiatif *Smart City*.

- Infrastruktur ICT untuk mendukung strategi tercantum di bawah ini :
 - ✓ Jaringan 5G
 - ✓ Fiber Broadband
 - ✓ Fiber Backhaul

Pusat Data

- Pusat Data guna melayani Sistem Data dan TI Pemerintah, yakni Pusat Data Pemerintah Pusat dan Pusat Data Tepi



Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – G. Prinsip Dasar Pemindahan serta Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan (1/2)

Skenario Pemindahan Kelembagaan ke IKN*)

Pemindahan IKN dan Momentum Penerapan Smart Governance di IKN



Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan ASN dan K/L ke IKN



Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – G. Prinsip Dasar Pemindahan serta Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan (2/2)

Rekomendasi Koridor Umum Perhitungan Pemindahan ASN dan Unit Organisasi K/L ke IKN Baru

LANGKAH-1: Koridor Asesmen Unit Organisasi K/L yang akan dipindahkan ke IKN

Exercise dilakukan oleh masing-masing K/L mempertimbangkan:

- a) Tingkat kepentingan/urgensi Unor;
- b) Unor yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik (*berpotensi tidak dipindahkan*);
- c) Transformasi cara kerja baru di IKN (*shared office, flexible working arrangement, dan smart governance*).

LANGKAH-2: Koridor Asesmen ASN Yang Akan Dipindahkan ke IKN

Exercise dilakukan oleh masing-masing unit kepegawaian K/L mempertimbangkan:

- a) ASN dengan pendidikan minimal D-3;
- b) Memperhatikan Batas Usia Pensiun;
- c) Data ASN berkinerja tinggi
- d) Data kompetensi dan potensi ASN.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – H. Prinsip Dasar Pemindahan Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional ke IKN

- Jumlah PNA dan OI yang teridentifikasi akan didorong perpindahannya dari Jakarta ke IKN*:

- ✓ 104 Kedutaan Besar
- ✓ 27 Organisasi Internasional

- Perwakilan pemerintah asing yang tidak berpindah dari Jakarta:

- ❑ 25 Konsul Kehormatan
- ❑ 21 Misi ASEAN

21 Misi ASEAN tidak berpindah mempertimbangkan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

*Berdasarkan data per November, 2021

Skenario Relokasi bagi PNA/OI ke IKN

| | Realokasi PNA dan OI ke IKN Baru |
|------------------------|---|
| Skenario | <ul style="list-style-type: none"> • PNA/OI memindahkan kantor perwakilannya ke IKN baru. • PNA/OI membuka kantor perwakilan di IKN baru sebagai fungsi representasi. |
| Dukungan dan Fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan kantor PNA dan OI di area <i>diplomatic compound</i> • Mekanisme pemindahan PNA/OI pada fase transisi serta penyediaan fasilitas layanan diplomatik PNA dan OI • Sarana dan prasarana IKN yang menunjang operasional kegiatan PNA dan OI |

- Perpindahan kedutaan besar pemerintah asing ke IKN Baru akan menempati area *diplomatic compound* di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
- Status lahan bagi PNA dan OI di area *diplomatic compound* diperuntukkan bagi keperluan diplomatik.
- Jangka waktu perpindahan PNA dan OI ke IKN baru diharapkan berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun setelah tanggal penetapan status IKN.

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – I. Prinsip Dasar Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Negara



Sistem Pertahanan IKN

- Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada:
 - Pembangunan Postur Pertahanan Negara
 - Pembangunan Sistem Pertahanan Negara
 - Pembangunan Kelembagaan
- Pendekatan Pertahanan Aktif dan Pertahanan Berlapis
- **Konsep *Virtual Maritime Gate* Ibu Kota Negara di Selat Makassar** untuk mengidentifikasi segala bentuk obyek terapung ataupun bawah air yang melalui Selat Makassar menuju wilayah ibu kota negara



Sistem Keamanan IKN

- Keamanan IKN akan didukung oleh ***smart security*** yang mengusung konsep sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi adanya bahaya, bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan security system support (piranti perlengkapan).
- Konsep *smart security* di IKN pada pada tahap awal ini akan menyasar terwujudnya “*safe and secure city*”
- Konsep *smart security* IKN secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu (1) pelayanan kepolisian dan (2) pencegahan kejahatan (*reducing crime/prevention*)



Keamanan Siber di IKN

Dalam melaksanakan pengamanan siber terdapat beberapa prinsip utama yang melandasi kerangka konseptual keamanan siber yaitu Kerahasiaan, Integritas, Otentifikasi, Ketersediaan dan Nir-penyangkalan. Prinsip tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam *cyber security framework* atau kerangka kerja keamanan siber. Konsep tersebut merujuk pada *cyber security framework* NIST yang menggambarkan lima fungsi dalam siklus keamanan siber yaitu *Identify, protect, detect, respond, dan recover*.



Tata Ruang Pertahanan dan Keamanan IKN

Pembangunan tata ruang pertahanan IKN diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang terintegrasi sehingga mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana.



BAB IV

Rencana Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (1/6)



Tahapan pembangunan dibagi menjadi 5 tahap:

- Tahap 1 (2022-2024)
- Tahap 2 (2025-2029)
- Tahap 3 (2030-2034)
- Tahap 4 (2035-2039)
- Tahap 5 (2040-2045)



Fokus dalam **penahapan pembangunan** meliputi:

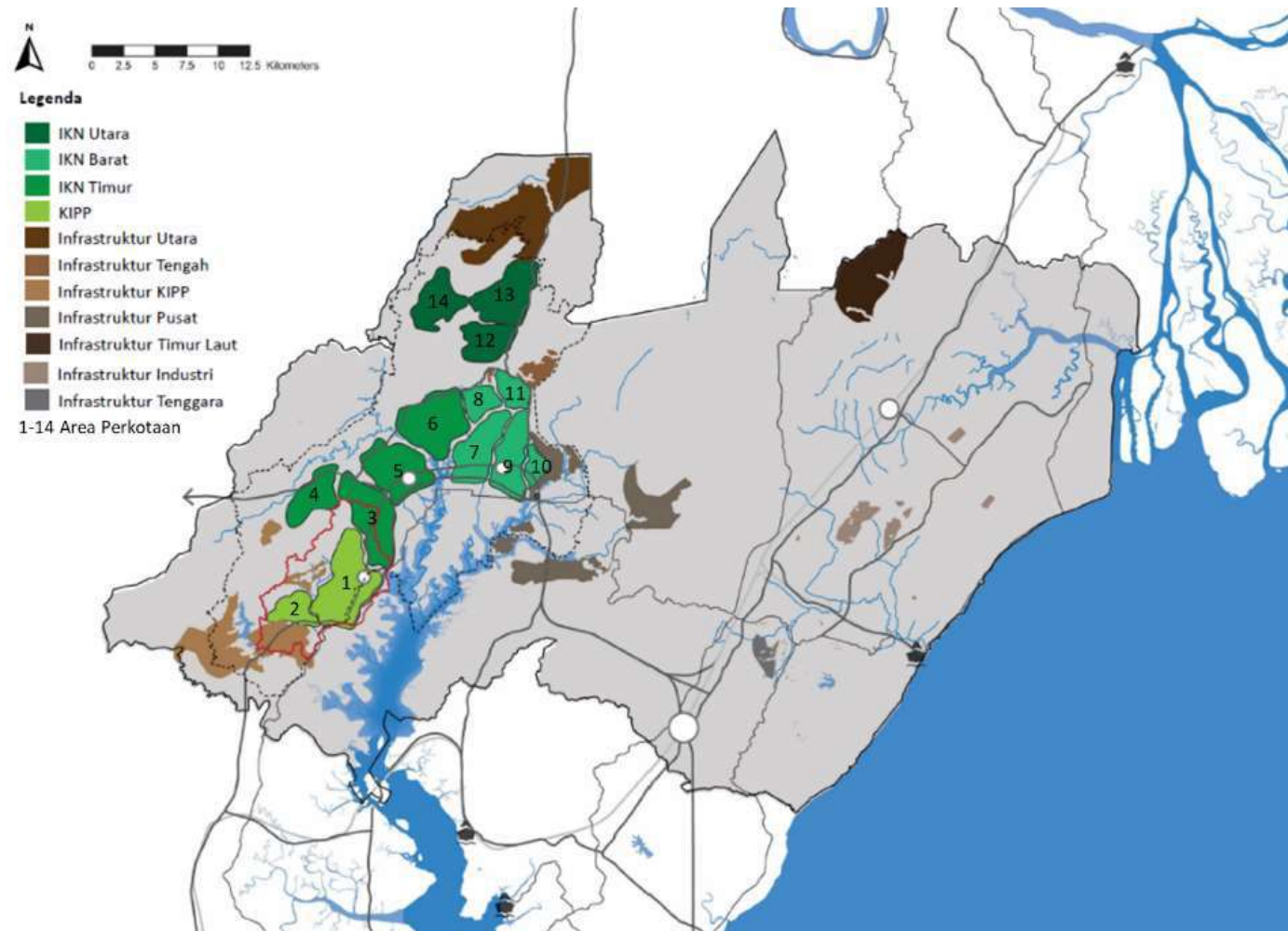
- Karakteristik Penduduk IKN
- Sosial
- Infrastruktur dan Lingkungan
- Pengembangan Kawasan
- Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di K-IKN dan kawasan lainnya
- Pertahanan dan Keamanan



Penahapan ini juga menjelaskan perwujudan pemanfaatan ruang yang mengindikasikan **pengembangan Kawasan** mulai dari KIPP, Kawasan IKN Timur, Kawasan IKN Barat, hingga Kawasan IKN Utara.



Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk 6 klaster dan 2 *enabler*



Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (2/6)

| Aspek | TAHAP 1 (2022-2024) | TAHAP 2 (2025-2029) | TAHAP 3 (2030-2034) | TAHAP 4 (2035-2039) | TAHAP 5 (2040-2045) |
|------------------------------|---|---|--|--|--|
| Karakteristik Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> ASN K/L TNI/Polri/BIN direncanakan untuk pindah terlebih dahulu (pada T-1). Keluarga ASN, TNI, POLRI dan BIN; Tenaga Kerja beserta keluarganya; Penduduk lokal. | <ul style="list-style-type: none"> ASN K/L Keluarga ASN, TNI, POLRI & BIN; Investor/pengusaha Tenaga Kerja beserta keluarganya; Akademisi, peneliti, dan keluarganya; Mahasiswa; Penduduk lokal. | <ul style="list-style-type: none"> ASN K/L Keluarga ASN, TNI, POLRI dan BIN; Investor/pengusaha Tenaga Kerja beserta keluarganya; Akademisi, peneliti, & keluarganya; Mahasiswa; Penduduk lokal. | <ul style="list-style-type: none"> ASN K/L Keluarga ASN, TNI, POLRI & BIN; Investor/pengusaha Tenaga Kerja beserta keluarganya; Akademisi, peneliti, & keluarganya; Mahasiswa; Penduduk lokal. | <ul style="list-style-type: none"> ASASN K/L Keluarga ASN, TNI, POLRI dan BIN; Investor/pengusaha; Tenaga Kerja beserta keluarganya; Akademisi, peneliti, dan keluarganya; Mahasiswa; Penduduk lokal. |
| Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan; pembangunan fasilitas umum (balai adat, ruang publik), pelibatan masyarakat lokal dan stakeholder terkait dalam proses identifikasi aset cagar budaya, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah DAS; peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi; serta pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia. | | | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan bagi sektor-sektor baru; serta peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia. | |
| Infrastruktur dan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sebagian jalan tol untuk mendukung IKN Pembangunan TPST, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kolam Retensi, SPAM di sebagian KIPP Tahap 1. Fasilitas penyediaan listrik telah tersedia untuk melayani penduduk K-IKN Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku dan jaringan transmisi air bakunya. Sistem drainase makro utama perkotaan. Pembangunan Infrastruktur TIK: Jaringan Utama Telekomunikasi, BTS, jaringan interkoneksi dan jaringan Transmisi Tegangan Tinggi. Sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan/kebugaran, perdagangan, dan akumasi untuk mendukung perkantoran dan perumahan. | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Bandara VVIP Peningkatan kapasitas terpasang Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku. IPAL untuk melayani kawasan eksisting beroperasi. Pengembangan pusat data terpadu untuk mendukung layanan pengelolaan kota (pemerintahan, publik, dan usaha) atau <i>smart city backbone</i>. Penambahan amenities perkotaan (layanan sekunder dan tersier) untuk mendukung aktivitas umum, bekerja, berusaha, dan wisata kota. | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sistem angkutan umum massal di K-IKN IPAL yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50% IPAB yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 50% Bendungan Batu Lepek telah beroperasi pada tahap ini. Daerah detensi daerah terbangun dan juga pembangunan fasilitas pemanenan air hujan di bangunan-bangunan milik pemerintah. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di kawasan prioritas. | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya KA Regional mendukung IKN Ekpansi IPAL yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas sekitar 100%. Penambahan kapasitas yang telah ada, serta penambahan fasilitas di wilayah timur laut dan Solar farm di wilayah IKN Utara. Identifikasi potensi dan rancangan bendungan multiguna lainnya. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di K-IKN. | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi telah mencapai tahap akhir Pengembangan potensi bendungan multiguna lainnya. Penambahan amenities digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di K-IKN. |

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (3/6)

| Aspek | TAHAP 1 (2022-2024) | TAHAP 2 (2025-2029) | TAHAP 3 (2030-2034) | TAHAP 4 (2035-2039) | TAHAP 5 (2040-2045) |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| Pengembangan Kawasan | <p>Tahap pembangunan kota – Tahap 1 (2024) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagian KIPP tahap 1A Sub-BWP I <p>Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pusat Smart Government Kawasan perkantoran Kawasan permukiman | <p>Tahap pembangunan kota – Tahap 2 (2029) di 3 kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KIPP tahap 1A, sebagian 1B Sub-BWP I Kawasan IKN Barat Kawasan IKN Timur <p>Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pusat Smart Government Kawasan perkantoran - Perluasan Kawasan bisnis - Perluasan Hotel Bisnis dan MICE - Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan Riset dan pengembangan talenta Universitas unggulan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) Hotel & Eco Resort Kawasan industri | <p>Tahap pembangunan kota – Tahap 3 di 3 kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KIPP tahap 1B Sub-BWP I, sebagian tahap 2A sub-BWP II Kawasan IKN Barat Kawasan IKN Timur <p>Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pusat Smart Government Kawasan perkantoran - Perluasan Kawasan bisnis - Perluasan Hotel Bisnis dan MICE - Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> - Perluasan Riset dan pengembangan talenta - Perluasan Universitas unggulan - Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) - Perluasan Hotel dan Eco resort - Perluasan Kawasan industri – Perluasan | <p>Tahap pembangunan kota – Tahap 4 di 4 kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KIPP tahap 2A, dan sebagian tahap 2B sub-BWP II Kawasan IKN Barat Kawasan IKN Timur Kawasan IKN Utara <p>Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pusat Smart Government Kawasan perkantoran - Perluasan Kawasan bisnis - Perluasan Hotel Bisnis dan MICE - Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> - Perluasan Pusat riset dan pengembangan talenta - Perluasan Universitas unggulan - Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) - Perluasan Hotel dan Eco resort – Perluasan Kawasan industri – Perluasan | <p>Tahap pembangunan kota – Tahap 5 di 4 kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KIPP tahap 2B sub-BWP II, tahap 3A dan 3B Sub-BWP III Kawasan IKN Barat Kawasan IKN Timur Kawasan IKN Utara <p>Zona <i>Mixed Use</i> dengan tipologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pusat Smart Government Kawasan perkantoran - Perluasan Kawasan bisnis - Perluasan Hotel Bisnis dan MICE - Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> - Perluasan Pusat riset dan pengembangan talenta - Perluasan Universitas unggulan - Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) - Perluasan Hotel dan Eco resort- Perluasan Kawasan industri – Perluasan |

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (4/6)

| Aspek | TAHAP 1 (2022-2024) | TAHAP 2 (2025-2029) | TAHAP 3 (2030-2034) | TAHAP 4 (2035-2039) | TAHAP 5 (2040-2045) |
|--|---|--|---|--|--|
| Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di K-IKN dan kawasan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Pemerintahan <i>Induced</i> | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan - Perluasan Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan <i>Electric 2-Wheeler</i> (kantor dan litbang) <i>Solar PV</i> (kantor dan litbang) Ekowisata dan MICE Industri 4.0 center of excellence <i>Biosimilar</i> (kantor dan litbang) API (kantor dan litbang) Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang) Pertanian (kantor dan litbang) Protein nabati (kantor dan litbang) Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) Universitas dan lembaga vokasi unggulan <i>Biofuel</i> (kantor dan litbang) Pertambangan I.4.0 Petrokimia – Perluasan dan Oleokimia | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan - Perluasan Pemerintahan <i>Induced</i> - Perluasan <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) - Perluasan Solar Panel (kantor dan litbang) - Perluasan Ekowisata dan MICE - Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan <i>Biosimilar</i> (kantor dan litbang) – Perluasan <i>Biofuel</i> (kantor dan litbang) – Perluasan Petrokimia dan oleokimia - Perluasan API (kantor dan litbang) – Perluasan Herbal dan ekstrak tanaman (kantor dan litbang) – Perluasan Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan Vaksin (kantor dan litbang) Gasifikasi batu bara OEM Hub dan Perluasan Pertambangan I 4.0 – Perluasan | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan - Perluasan Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) – Perluasan Solar Panel (kantor dan litbang) – Perluasan Ekowisata dan MICE – Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan <i>Biosimilar</i> (kantor dan litbang) – Perluasan Petrokimia dan oleokimia - Perluasan API (kantor dan litbang) – Perluasan Industri farmasi baru – Perluasan dari API dan Petrokimia/oleokimia Bahan bakar sintetis (kantor dan litbang) Herbal (kantor dan litbang) – Perluasan Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan Vaksin (kantor dan litbang) - Perluasan Gasifikasi batu bara OEM Hub dan Perluasan Industri Nutrisi – Perluasan dari protein nabati, ekstrak tanaman dan herbal | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan - Perluasan Pemerintahan <i>Induced</i> – Perluasan <i>Electric 2 Wheeler</i> (kantor dan litbang) – Perluasan Solar Panel (kantor dan litbang) – Perluasan Ekowisata dan MICE – Perluasan Industri 4.0 <i>center of excellence</i> – Perluasan <i>Biosimilar</i> (kantor dan litbang) – Perluasan Petrokimia dan oleokimia - Perluasan API (kantor dan litbang) – Perluasan Industri farmasi baru – Perluasan dari API dan petrokimia/oleokimia Bahan bakar sintetis (kantor dan litbang) Herbal (kantor dan litbang) – Perluasan Pertanian (kantor dan litbang) – Perluasan Protein nabati (kantor dan litbang) – Perluasan Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (rumah sakit internasional) – Perluasan Universitas dan lembaga vokasi unggulan – Perluasan Vaksin (kantor dan litbang) - Perluasan Gasifikasi batu bara OEM Hub dan Perluasan Industri Nutrisi – Perluasan dari protein nabati, ekstrak tanaman dan herbal |

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (5/6)

| Aspek | TAHAP 1 - KIPP (2022-2024) | TAHAP 2 – KIPP – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2025-2029) | TAHAP 3 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2030-2034) | TAHAP 4 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2035-2039) | TAHAP 5 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2040-2045) |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pertahanan dan Keamanan | TNI AD <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Pemindahan sebagian subden Markas Besar beserta personil | TNI AD <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Pembentukan kodam khusus Realokasi satuan TNI | TNI AD <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Pembentukan kodam khusus Realokasi satuan TNI | TNI AD <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Pembentukan kodam khusus Realokasi satuan TNI | TNI AD <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Pembentukan kodam khusus Realokasi satuan TNI |
| | TNI AL <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Pemindahan sebagian subden Markas Besar beserta personil | TNI AL <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan) Realokasi satuan TNI | TNI AL <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan) Realokasi satuan TNI | TNI AL <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan) Realokasi satuan TNI | TNI AL <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Gelar <i>coastal surveillance</i> (permukaan dan bawah permukaan) Realokasi satuan TNI |
| | TNI AU <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Pemindahan sebagian subden Markas Besar beserta personil Pembangunan Komando Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas) | TNI AU <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi TNI AU Pembangunan pangkalan udara | TNI AU <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi TNI AU Pembangunan pangkalan udara | TNI AU <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi TNI AU Pembangunan pangkalan udara | TNI AU <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi TNI AU Pembangunan pangkalan udara |
| | Mabes TNI <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Pemindahan sebagian subden Markas Besar beserta personil Relokasi Satuan Paspamres | Mabes TNI <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi satuan/pemindahan pegawai | Mabes TNI <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi satuan/pemindahan pegawai | Mabes TNI <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi satuan/pemindahan pegawai | Mabes TNI <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan sarpras Realokasi satuan/pemindahan pegawai |
| | Kementerian Pertahanan <ul style="list-style-type: none"> Gedung perkantoran dan Sarpras Pemindahan pegawai | Kementerian Pertahanan <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Realokasi satuan/pegawai | Kementerian Pertahanan <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Realokasi satuan/pegawai | Kementerian Pertahanan <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Realokasi satuan/pegawai | Kementerian Pertahanan <ul style="list-style-type: none"> Gedung Perkantoran dan Sarpras Realokasi satuan/pegawai |

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – A. Penahapan Pembangunan IKN (6/6)

| Aspek | TAHAP 1 - KIPP (2022-2024) | TAHAP 2 – KIPP – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2025-2029) | TAHAP 3 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2030-2034) | TAHAP 4 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2035-2039) | TAHAP 5 – KIKN – KPIKN – LUAR KPIKN (2040-2045) |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| Pertahanan dan Keamanan | POLRI <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Gelar Command Center dan Smart Security Pemindahan sebagian personil kantor pusat BIN <ul style="list-style-type: none"> Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Pembangunan Puskodal Pemindahan sebagian personil BSSN <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SOC IKN Pemindahan sebagian personil | POLRI <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Gelar Command Center dan Smart Security Relokasi pegawai BIN <ul style="list-style-type: none"> Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Pemindahan sebagian personil BSSN <ul style="list-style-type: none"> Gelar SOC IKN | POLRI <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Gelar Command Center dan Smart Security Relokasi pegawai BIN <ul style="list-style-type: none"> Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Pemindahan sebagian personil BSSN <ul style="list-style-type: none"> Gelar SOC IKN | POLRI <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Gelar Command Center dan Smart Security Relokasi pegawai BIN <ul style="list-style-type: none"> Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Pemindahan sebagian personil BSSN <ul style="list-style-type: none"> Gelar SOC IKN | POLRI <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satuan baru Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Gelar Command Center dan Smart Security Relokasi pegawai BIN <ul style="list-style-type: none"> Gedung, perkantoran, sistem, dan sarpras Pemindahan sebagian personil BSSN <ul style="list-style-type: none"> Gelar SOC IKN |

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – B. Skema Pendanaan IKN (1/2)

1 Skema APBN

- Sumber Dana : APBN (Belanja K/L atau Otorita IKN)
- Metode Pengadaan:
Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan karakteristik pembangunan IKN dan sesuai tata kelola yang baik.

2 Skema KPBU

- Sumber Dana : APBN dan/atau Badan Usaha Swasta
- Metode Pengadaan : Pengadaan KPBU
- Sebelum Otorita IKN berfungsi, PJPk adalah K/L terkait, dan dapat berlanjut sampai akhir masa kontrak atau diserahkan kepada Otorita IKN

KPBU Tarif / *User Payment*

Sumber Dana:

- Periode Konstruksi: (i) Badan Usaha dan *Financier*, (ii) APBN, dalam bentuk VGF (dalam hal diperlukan dukungan kelayakan)
- Periode Pengembalian Investasi: Pengguna membayar layanan / tarif layanan

KPBU *Availability Payment* (AP)

Sumber Dana:

- Periode Konstruksi: (i) Badan Usaha dan *Financier*, (ii) APBN, dalam bentuk VGF (dalam hal diperlukan dukungan kelayakan)
- Periode Pengembalian Investasi: APBN, dalam bentuk Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) oleh K/L terkait atau Otorita IKN

Catatan :
Pemilihan opsi skema pendanaan melalui analisis
Value for Money (VfM)

Bab IV Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan IKN – B. Skema Pendanaan IKN (2/2)

3 Skema Partisipasi BUMN / Swasta Murni

- Sumber Dana: dukungan APBN, BUMN, dan/ atau Swasta
- Metode Pengadaan : Pengadaan BUMN dan/ atau Swasta
- Bentuk Penugasan kepada BUMN sebagai kontraktor dan operator atau bekerja sama dengan swasta

4 Skema Dukungan Pendanaan/Pembiayaan Internasional

5 Skema pendanaan lainnya (*creative financing*)

6 Dukungan Kelembagaan untuk Kerjasama

- Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Khusus IKN, untuk mengoptimalkan struktur kerjasama guna meningkatkan layanan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- Kebutuhan Dukungan Regulasi:
 - Peraturan kelembagaan Otorita IKN

BUMN sebagai kontraktor dan operator

- Sumber Dana:
 - Periode Konstruksi:
 - (i) APBN dalam bentuk belanja K/L atau PMN;
 - (ii) modal BUMN; dan
 - (iii) pinjaman lender

BUMN bekerja sama dengan Swasta

- Sumber Dana:
 - Periode Konstruksi: APBN dalam bentuk PMN BUMN yang besarnya maksimum 30% dari nilai investasi, Badan Usaha dan *Financier* (sekitar 70%)

Partisipasi Swasta Murni

Terima Kasih



(021) 390 5643
ext. 3316



ikn@bappenas.go.id



Gedung Bappenas Rasuna Said Lt.
8
Jl. H.R. Rasuna Said, Kec.
Setiabudi
Jakarta Selatan 12920